

JUDUL

**STUDY IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT (STBM) DI DESA SEKATAK BUJI KECAMATAN
SEKATAK KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021**



SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai
Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

Siti Munawarah

NPM. 201951020

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pertumbuhan di wilayah perkotaan maupun kabupaten yang begitu pesat menjadikan munculnya bermacam-macam permasalahan yang sangat kompleks, salah satu permasalahan yang belum tuntas saat ini adalah masalah Sanitasi. Sanitasi menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Semakin banyak pemukiman padat penduduk akan menambah keseriusan lingkungan, terbatasnya lahan terbuka hijau dan yang sangat serius adalah terhadap penurunan daya dukung lingkungan yang disebabkan perilaku manusia itu sendiri (Rachmaddianto et al., 2015). Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan No.3 tahun 2014 mengeluarkan sebuah kebijakan tentang program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang bertujuan untuk mendorong masyarakat secara mandiri menghentikan kebiasaan buang air besar di tempat terbuka.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan. Pendapat para ahli (dalam Widodo, 2009:88) bahwa implementasi adalah suatu proses yang

melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap dipengaruhi objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada disekolah atau sebuah lembaga.

Sanitasi merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat sehat. Sanitasi yang baik akan menciptakan sebuah keteraturan lingkungan, meningkatkan produktifitas manusia dan mengurangi pencemaran lingkungan yang akan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Hal ini ditunjang dalam (Bernynda,2018). Kondisi kurangnya akses sanitasi yang layak pada Masyarakat memicu timbulnya berbagai macam penyakit dipedesaan dibandingkan didaerah yang lebih maju. Di karenakan pola kehidupan yang akan mempengaruhinya, yaitu dengan hidup sehat ataupun dari beberapa aspek yang menjadi pemicunya (Lahudin,2018). Kondisi jamban masyarakat yang sebagian masih menunjukkan keadaan jamban yang tidak tepat. Letak jamban, dan pelindung atau penutup jamban yang dibuat dengan seadanya, serta kesan kumuh yang ada pada keadaan jamban tersebut. Sehingga pengurus program melakukan peninjauan terhadap keadaan jamban masyarakat. Implementasi Program

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dalam pengendalian lingkungan berupaya untuk menanggulangi masalah sanitasi yang berdampak buruk terhadap lingkungan yang belum berjalan dengan baik, maupun permasalahan sanitasi yang kurang tepat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) adalah sebuah program yang dibuat oleh kementerian kesehatan, tujuan dibentuknya program ini adalah untuk menciptakan pola hidup masyarakat untuk paham dan akan sadar dengan lingkungan dan menjauhkan masyarakat dengan budaya perilaku masyarakat yang masih kurang dan sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Menurut Azrul Anwar berpendapat bahwa sanitasi adalah cara dalam bentuk pengawasan kepada masyarakat yang berpacu pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan harus mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, Perumahan dan Permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat (UU Perkim RI,1992). Upaya kesehatan lingkungan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat yang dimaksud mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat fasilitas umum.

Pada umumnya Desa Sekatak buji termasuk desa yang permukiman nya padat dan kumuh, sehingga terdapat sedikit Kondisi dan permasalahan ini dapat berdampak timbulnya berbagai jenis penyakit. Salah satu upaya dalam memperbaiki kualitas kesehatan lingkungan yang permukimannya padat dan kumuh serta pemenuhan kebutuhan air bersih

tersebut adalah dengan cara membangun fasilitas Sanitasi Dasar yang meliputi sarana air bersih dan Jamban Keluarga yang sehat.

Berdasarkan data dari hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka stunting di Kaltara mencapai 27,5 persen, lebih tinggi 3 persen dibandingkan angka rata-rata nasional sebesar 24,5 persen. Pada Tahun 2021 wilayah Sekatak masih jadi perhatian terkait pencegahan stunting. Dikarenakan masih Banyaknya Pernikahan Dini, Hal itu menjadikan perencanaan keluarga yang keliru karenanya ke depan harus adanya pendampingan dari pemerintah untuk mencegah itu. Tujuan DAK infrastruktur Bidang Sanitasi ini yaitu dalam Rangka mendukung tema penurunan angka kematian ibu dan stunting serta penanggulangan Kemiskinan, dan kurangnya Jamban atau Toilet yang mengharuskan warga masyarakat Sekatak Harus Buang Air Besar disungai yang mengakibatkan tercemarnya air sungai. Sebagai Salah satu Bentuk Komitmen Untuk mempercepat penurunan stunting. Program Ini dimulai tahun 2021 usulan dan perencanaan dimulai Tahun 2020 pada Bulan April – Juni, adapun Jumlah yang mendapat Bantuan ini sekitaran 134 KK untuk wilayah Sekatak Buji itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul *“Study Implementasi Kebijakan bantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak kabupaten Bulungan Tahun 2021”* Tujuan saya mengangkat judul ini karena ingin menambah wawasan dan informasi bagi para pembaca mengenai Implementasi bantuan serta Sanitasi Total Berbasis Masyarakat .

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah merupakan Masalah yang timbul dari latar belakang dalam penelitian, kemudian dikaitkan dengan realita atau kenyataan yang ada pada masyarakat saat ini, Sehingga adapun Rumusan Masalah yang didapat sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi bantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan ?
2. Adakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Bantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tentang Pembangunan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu Pada Identifikasi dan Perumusan Masalah tersebut, Maka tujuan yang akan dicapai melalui Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Bantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Sanitasi Total Berbasis yang dilaksanakan di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak.
2. Untuk Mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam Implementasi Bantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan Penelitian tersebut, maka manfaat Penelitian adalah sebagai berikut:

1. *Manfaat Teoritis*, Secara Teoritis manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Khususnya terkait dengan Implementasi Bantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
2. *Manfaat Praktis*, Secara Praktis manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai bahan perbandingan untuk peneliti sebelumnya
 - b. Sebagai bahan informasi tentang pelaksanaan Program bantuan Sanitasi desa yang telah berjalan, terkait dengan hambatan-

hambatan dan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Pembatasan Konsep

Menurut Asep Saepul Hamdi dan E. Bahrudin (2015) Pembatasan konsep adalah pembatasan permasalahan-permasalahan yang akan diambil dalam penelitian. Di sisi lain, batasan masalah juga diartikan sebagai batasan terhadap ruang lingkup suatu permasalahan agar pembahasan bisa fokus pada satu penelitian, tidak terlampaui jauh atau melebar ke topik lainnya.

1. Lingkup pembahasan yaitu Seputar Implementasi bantuan Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang tentang sanitasi total berbasis masyarakat
2. Pembahasan meliputi Implementasi Bantuan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian dan penerima bantuan, pembangunan Tangki Septik Individual Pabrikasi, Serta program bantuan Sanitasi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja neagara tahun anggaran 2021 telah dilaksanakan atau belum.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang saling berkaitan dan pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian, penelitian atau penulis pertama yaitu :

Tabel 1.1

No	Peneliti	Tujuan Penelitian	Deskripsi
1	Mardewi Wahyuningsih (2016) “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3	Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten	Penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

	<p>Tahun 2014 tentang Sanitasi Total berbasis Masyarakat (Studi Pada Program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)”</p>	Bojonegoro.	<p>Berdasarkan hasil Penelitian dan Analisis terkait dengan Implementasi program stop buang air besar sembarangan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang Telah penulisan analisis menggunakan model implementasi oleh Daniel Van Metter dan Carl Van Horn sebelumnya. Secara garisbesar pemerintah Desa Kandangan Telah mengimplementasikan program stop buang air besar sembarangan ini, namun masih ada beberapa hal yang perlu untuk dibenahi.</p>
2	<p>Moh Fajar Noorrahman (2020)</p> <p>“Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Melalui</p>	<p>Untuk Mengetahui efektivitas atau hasil pada program sanitasi total berbasis Masyarakat (STBM) melalui gerakan Stop Buang Air Besa Sembarangan di Desa Pawalutan Kecamatan</p>	<p>Metode peneltiaan yang digunakan adalah penelitian Kualitatif Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini secara umum dapat diklasifikasikan dalam bentuk data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh</p>

	<p>gerakan Stop Buang Air besar sembarangan (BABS) di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara”</p>	<p>Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara</p>	<p>melalui teknik triangulasi dengan jalan menggabungkan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi</p> <p>hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Melalui Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong belum efektif ditinjau dari berbagai aspek Pertama, pada aspek keberhasilan program dalam hal perilaku hidup sehat warga masyarakat tidak terpenuhi disebabkan masih adanya sebagian warga masyarakat yang melakukan BABS di sejumlah tempat dari karena tidak memiliki jamban di rumahnya. Di samping itu, ditemukan fakta tentang kurangnya pengetahuan sebagian warga masyarakat</p>
--	---	--	---

			<p>terhadap dampak yang diakibatkan dari BABS yang mereka lakukan.</p> <p>Kedua, pada aspek keberhasilan dalam hal sasaran pencapaian tujuan masih belum terwujud dikarenakan penyediaan jamban sehat belum mencakup keseluruhan warga masyarakat yang tidak memiliki jamban di rumahnya. Adapun dalam hal tingkat keberhasilan belum terwujud dikarenakan baru sebagian kecil warga masyarakat yang telah menerima bantuan jamban sehat.</p> <p>Ketiga, pada aspek kepuasan terhadap program dalam hal kebutuhan warga masyarakat selaku pengguna belum cukup memadai dalam hal pendanaan pembuatan jamban sehat sebab dana diberikan secara bertahap sedangkan dalam hal kepuasan warga masyarakat selaku pengguna tergolong</p>
--	--	--	--

			<p>rendah dari karena dana pembuatan jamban sehat diberikan secara bertahap.</p> <p>Keempat, pada aspek tingkat perbandingan input dan output diketahui dalam hal besaran anggaran belum memadai untuk membiayai pembuatan keseluruhan jamban sehat. Adapun dalam hal hasil program masih belum terpenuhi dikarenakan dana desa juga diperuntukkan bagi pembangunan fisik lainnya di desa sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan keseluruhan warga masyarakat. Kelima, pada aspek pencapaian tujuan menyeluruh dalam hal sosialisasi sudah pernah diselenggarakan oleh instansi yang terkait sedangkan dalam hal pembinaan terhadap masyarakat dilakukan oleh pihak Puskesmas dibantu aparat desa.</p>
--	--	--	---

3	Eko Sulistiono (2021)	Implementasi Program Stop Buang Air Sembarangan (BABS) pada Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Dukun, Kabupaten Gresik	<p>Metode penelitian mempergunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengkajian kepustakaan ialah dengan rangkaian aktivitas yang terkait dengan pengumpulan data, bacaan serta catatan olah bahannya,</p> <p>Hasil Penelitian Yaitu Upaya pemerintah dalam menangani permasalahan sanitasi yaitu melalui Pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas kesehatan tiap kabupaten hingga tingkat kelurahan/desa sebagai pelaksana kegiatan. Setelah sanitasi selesai dan kemudian penyerahan dilakukan pada swadaya masyarakat. Kesuksesan program yaitu didasari adanya peraturan yang mengikat. Dalam rangka menilai keberhasilan desa</p>

			<p>dan salah satunya adalah penyuksesan STBM sebagai program kerja sebuah institusi terendah di desa atau KSM (dalam rangka pencapaian tujuan desa BABS atau ODF peraturan tersebut merupakan suatu upaya pengawasan dan pengikat.</p> <p>Ketika program telah dilaksanakan, dan dilaksanakan , dan diserahkan oleh stakeholder pengelola sarana,tentuna KSM dengan keharusan melakukan pengaturan keorganisasian, penyusunan dan keanggotaannya.</p> <p>Kemudian dengan penyelerasan pada keadaan , setara jumlah yang harus dibayarkan , estimasi waktunya ataupun penugasan yang terkait selaras dengan standarisasinya , patuh dari kepenunjukkan KSM.</p>
--	--	--	---

Arah Penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi atau pelaksanaan bantuan Program Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM)

serta mencari tahu apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan program yang di Jalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada masyarakat Sekatak Buji, agar semua masyarakat sekatak juga bisa merasakan jamban yang sehat dan mendapatkan akses sanitasi yang baik serta pola hidup sehat.

2.3 Kajian Teoritis

Kajian teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian. Tanpa teori, akan sulit menjelaskan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian tersebut. Mengutip buku *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan*, Gamar Al Haddar, dkk, (2023: 84), [pengertian](#) kajian teori atau landasan teori adalah kumpulan definisi, konsep, dan perspektif yang terstruktur mengenai suatu objek.

2.3.1 Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004) Webster dalam Wahab (2004:64) adalah : Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan

Negara (2021) dalam Wahab (2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut : Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik, (2002) dalam (Harsono (2002:6) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program. dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan. implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.

2.3.2 Bantuan Sosial

pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer

uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan Sosial yang diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk : Uang, Barang dan Jasa

2.3.3 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Permenkes RI No.3 Tahun 2014). Penyelenggaraan STBM dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. STBM terdiri dari 5 pilar yaitu :

- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop-BABS)
- b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT)
- d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PS-RT)
- e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)

Jamban merupakan tempat yang aman dan nyaman digunakan sebagai tempat buang air besar. Jamban yang baik adalah jamban yang tinjanya langsung tergelontor kedalam lubang tangki dibawah tanah. Dan semua bagian jamban yang terbuka kearah tinja seperti tempat duduk dan tempat jongkok harus senantiasa dijaga kebersihannya dan tertutup rapat jika sedang tidak digunakan. Apabila jamban yang digunakan tidak saniter, maka dapat berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan lalat. Seperti yang diketahui lalat adalah salah satu vektor penularan penyakit diare. Lalat yang membawa kuman patogen pada bagian tubuhnya dapat mengkontaminasi makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia (Soeparman Suparmin, 2002). Permenkes No.3 Tahun 2014 Menyatakan bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang dimaksud dengan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sanitasi yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum, hingga meningkatnya jumlah kejadian Diare dan munculnya penyakit lainnya (Permenkes, 2014).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus fisik tahun Anggaran 2021, Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi Khusus Fisik penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) salah satunya yaitu Sanitasi, DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas Subbidang:

- a. Penguatan Intervensi Stunting;
- b. Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi; dan
- c. Keluarga Berencana.

DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) dikelompokkan ke dalam: Tematik Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

Menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2021 Tentang petunjuk operasional Pengelolaan dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut SDGs adalah target pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Pengawasan Teknis

adalah pembinaan dan/atau pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan DAK. Kegiatan Penunjang adalah kegiatan nonfisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik.

Tahapan pengelolaan DAK terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pemrograman;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Kebijakan pengelolaan DAK mengacu pada RPJMN dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah sebagai upaya mewujudkan prioritas nasional dan prioritas daerah, yaitu Bidang Sanitasi. Bidang sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk mendukung tema penurunan angka kematian ibu dan stunting serta penanggulangan kemiskinan dengan arah kebijakan:

- a. mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan tujuan dalam RPJMN 2020-2024 bidang sanitasi serta dukungan dalam pemenuhan SPM air limbah;
- b. Mendukung percepatan pembangunan sanitasi melalui peningkatan akses layanan sanitasi di kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024, program percepatan penurunan Kematian ibu dan Stunting. Serta penanggulangan kemiskinan akibat dampak corona virus disease 2019 secara nasional, peningkatan akses layanan sanitasi dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

- c. pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam strategi sanitasi kabupaten/kota

Bidang sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

- a. pengembangan dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman
- b. pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

2.3.4 Model Implementasi Kebijakan

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang Konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber daya (resources), Sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure)

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam

Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masingmasing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumber daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

- a. Sumber daya Manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

- b. Sumber daya Anggaran menurut Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.
- c. Sumber daya Peralatan menurut Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
- d. Sumber daya Kewenangan Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”

d. Struktur Birokrasi

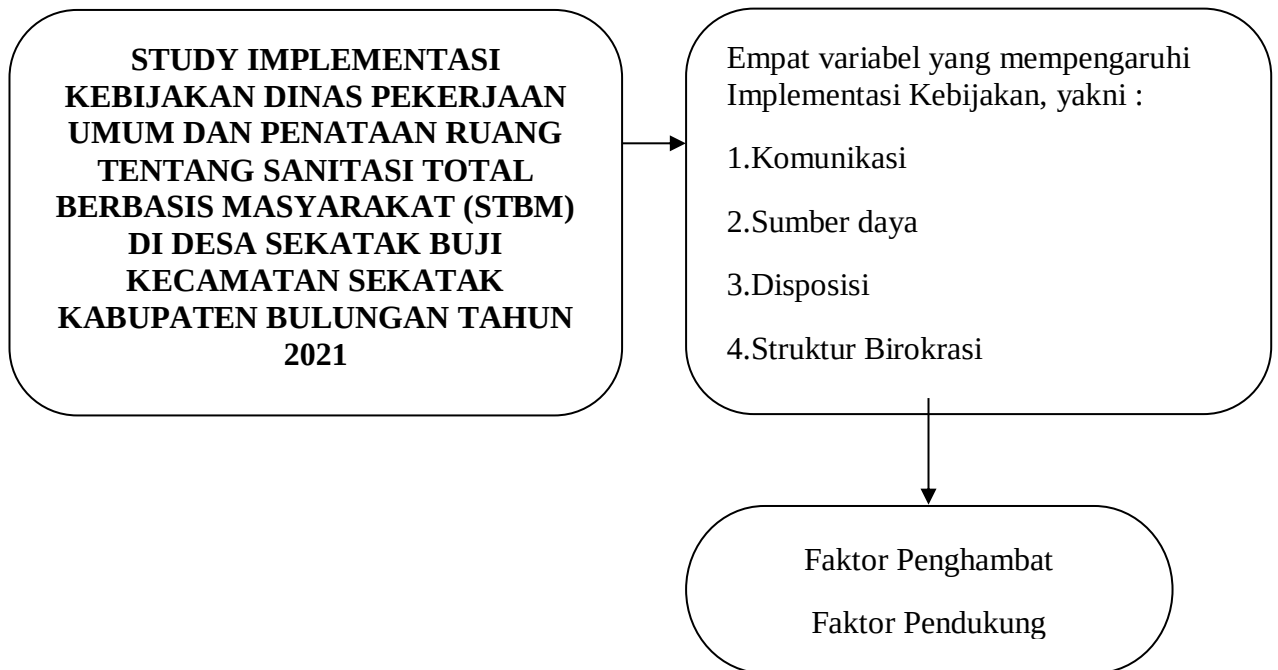
Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit

organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi".

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, kerangka berpikir dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep penelitian. Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Prof. dr.Sugiyono dalam bukunya yang berjudul "*metode penelitian administrasi Metode R&B*" Menyebutkan bahwa kerangka Berpikir yang dihasilkan dapat berupa Kerangka berpikir yang Asosiatif atau Hubungan maupun Komparatif atau Perbandingan.

Gambar Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi dan waktu penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Mencakup program dan waktu selama penelitian, pencapaian target penelitian hingga hasil yang diharapkan dalam penelitian sesuai dengan fokus penelitian beserta tujuan dan kegunaan penelitian.

Adapun tempat dan waktu penelitian ini pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jl. Jelarai Raya, Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung selor kabupaten bulungan, Provinsi Kalimantan Utara penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, penyusunan penelitian dan pelaksanaan penelitian.

Tabel 1.2

No	Tanggal	Kegiatan
1	12 Juni 2023	Seminar Judul
2	20 September 2023	Seminar Proposal
3		

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif (*Descriptive research*).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. Penelitian dilakukan dengan data-data penelitian bersumber langsung dari

objek peneliti. Tidak menggunakan rumu-rumus statistik namun menggunakan pendekatan-pendekatan sosial. Penelitian disajikan bersifat deskriptif dengan didukung data-data relevan atau valid atau nyata. Sehingga penelitian yang disajikan tidak bersifat karangan belaka. Sebagaimana menurut Suharsimi Arikunto (2010:3), bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan sesuatu hal misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.

3.3 Data dan sumber data

Dalam penelitian ini, penunjukan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive sampling*, sebagaimana dinyatakan Sugiyono (2012:54) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dan pertimbangan tertentu. Dimana peneliti menentukan informan berdasarkan jabatan yang diduduki nya, baik itu kedudukan dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat. informan yang telah ditentukan :

Tabel 1.3

No	Informan	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 orang
2	Pemerintahan Desa	2 Orang
3	Masyarakat	10 orang

Sumber data dalam penelitian yang bersifat kualitatif terdapat beberapa macam sumber yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan data-data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara: yaitu suatu metode pencarian data dengan cara wawancara langsung kepada tokoh atau nara sumber yang memiliki informasi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Arsip : yaitu suatu metode pencarian data penelitian melihat pada data data yang pernah ada dari suatu daerah yang telah diarsipkan, sehingga kearsipan tersebut menjadi data pendukung bagi data-data yang didapat pada masa sekarang.
3. Foto dan gambar : yaitu suatu media yang menyimpan suatu keterangan tempat dan waktu dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi, dan dijadikan sebagai data-data pendukung dalam penelitian.
4. Referensi Pustaka : merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku percetakan yang digunakan untuk mendapatkan data-data penelitian dengan cara dikutip dan keterangan tentang buku dilampirkan dalam daftar pustaka.
5. Sumber-sumber lainnya : yaitu sumber-sumber tak terduga yang diperoleh selama penelitian berlangsung, terkait data-data yang secara tidak sengaja didapatkan.

Sedangkan jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan peneliti melalui observasi dan wawancara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, informan ditentukan oleh peneliti, sesuai dengan pemaparan sugiyono (2012:126) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti akan menetapkan beberapa kriteria sampel. Serta menggunakan teknik *accidental sampling* menurut sugiyono (2016:124) *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang ditemui itu cocok sebagai sumber data.
- b. Data sekunder adalah data yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian.

3.4 Fokus penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana Implementasi bantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.
 - Berdasarkan kajian teori , maka indikator yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi atau penerapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di desa Sekatak Buji.
2. faktor-faktor penghambat dan pendukung Implementasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di desa Sekatak Buji.

3.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data Menurut Sugiyono (2013:224), mengemukakan bahwa teknik Pengumpulan data merupakan tahap paling utama pada penelitian, tujuan utamanya adanya analisis adalah untuk memperoleh data. Sehingga peneliti harus membuat teknik pengumpulan data yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Kepustakaan (*library search*)

Yaitu teknik pengumpulan data melalui buku-buku dan sumber-sumber bacaan lainnya sebagai tinjauan pustaka yang memuat tentang beberapa pendapat pakar yang berkaitan dengan penelitian guna mendukung dalam penulisan maupun pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (*field work research*)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penelitian dilaksanakan langsung kelapangan/lokasi penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam *field work research* adalah sebagai berikut:

a. Wawancara / *interview*

Merupakan sebuah interaksi sosial informal antara seorang peneliti dengan informannya untuk mendapatkan data yang valid, yaitu data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui, dilakukan dengan cara terkontrol, terarah dan sistematis (Afrizal, 2015:137)

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang didasarkan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk memperoleh keyakinan tentang keabsahan data, yang kemudian dapat mencatat perilaku dan kejadian seperti yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya dilapangan tempat dilakukannya penelitian.

c. Dokumentasi

Merupakan suatu cara menghimpun data dengan menggunakan dokumen baik yang bersifat tertulis, benda maupun foto atau gambar yang dengan sengaja disusun oleh lembaga terkait yang tentunya berhubungan dengan judul penelitian.

Data-data yang diperoleh dalam kualitatif menurut Bintang Yulisetyaningsih, pengolahan data dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mencatat ringkasan interpretasi peneliti atas hasil wawancara dan pengamatan serta catatan-catatan yang masih menjadi pertanyaan peneliti yang nantinya akan dikumpulkan atau diverifikasi dan informan lainnya.
2. Pencatatan data wawancara pada awal penelitian dilakukan dengan pencatatan langsung pada daftar isian pedoman wawancara.
3. Mengklasifikasi data yang telah terkumpul sesuai dengan kemanfaatannya dalam analisis data
4. Menganalisis data secara induktif analitik lebih lanjut dalam teknik analisis data.

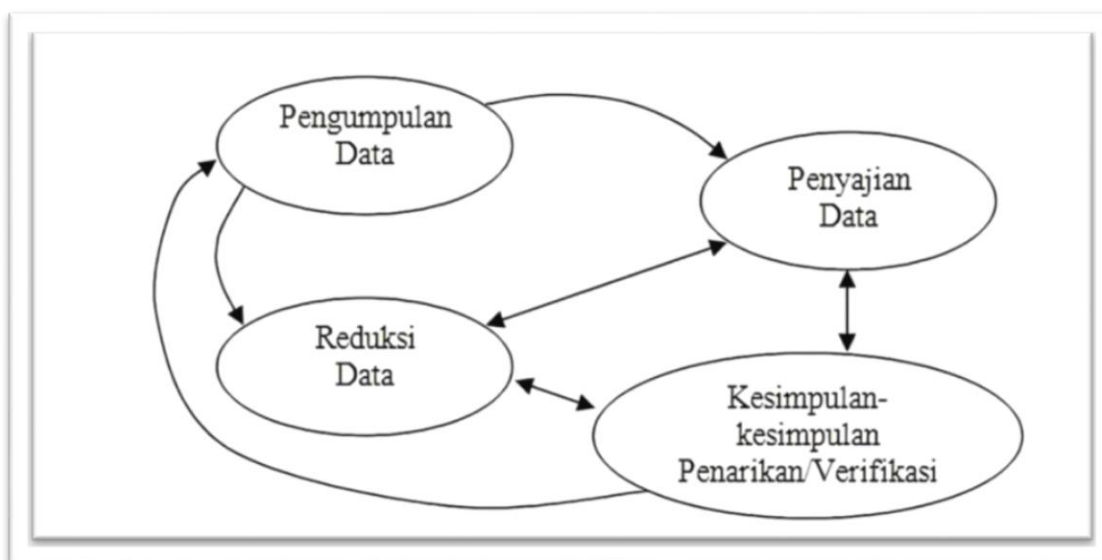
arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

3.6 Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya (Harris, 2010: 158).

Teknik analisis data adalah suatu metode yang menjadi dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan metode pendekatan sosial yaitu informasi dan data-data penelitian dicari dan diperoleh secara langsung dari sample atau narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992:16) analisis data kualitatif dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1



Sumber: Miles, Matthew & A Michael Huberman. 1992:16 . analisis Data Kualitatif

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah data pertama dan data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian. dimana data yang diperoleh langsung dari informan belum dipilah dan disusun sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah Propemilihan,memfokuskan,menterjemahkan, dengan membuat catatan, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data mempertajam/memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan

3. Penyajian data

Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan, memungkinkan penarikan kesimpulan/pengambilan tindakan. Pengambilan data ini, membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan. Disajikan dalam pengujian dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ir. Prasetyo, M.eng,. et all. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur bidang Sanitasi TA 2021.*

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian administrasi dilengkapi dengan metode R&D*

Penerbit Alfabeta, Bandung

Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik). Malang: Banyumedia Publishing.

Bernynda, Z. (2018). Efektivitas Strategi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama di Puskesmas Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang. In Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Elsa Putri Lahudin, Hariyono, A. M. (2018). Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Dengan Kejadian Diare. Nursing.

Gamar Al Haddar, dkk, (2023 : 84). *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan*. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Get Press Indonesia

Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Harsono, Hanifah, Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Grafindo Jaya, 2002.

Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Salemba. Humanika.

Surat Keputusan/Undang-Undang :

- Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik tahun Anggaran 2021

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021
- Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2014
- Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting
- Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Skripsi :

Mardewi Wahyuningsih (2016) dengan judul *“Implementasi peraturan menteri kesehatan nomor 3 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat”* (Studi Pada Program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro).

Eko Sulistiono (2021) dengan Judul *“Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Dukun, Kabupaten Gresik”*.

Moh fajar Noorrahman (2020) dengan judul *“Efektivitas Program Sanitasi total berbasis Masyarakat (STBM) melalui gerakan Stop buang air besar sembarangan (BABS) di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara”*.

Website :

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/43037>

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14331>

<http://ojs-al-iidara-balad.web.id/index.php/ANE2018/article/view/76>

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/211196/Permen%20PUPR_5_2022.pdf

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14331>

<https://media.neliti.com/media/publications/82665-ID-implementasi-program-gerakan-sanitasi-be.pdf>

<http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/925/4/4.%20chapter%202.pdf.pdf>

<https://eprints.uny.ac.id/8552/3/BAB%202%20-%2008417141005.pdf>